

Kamboja: Ada 174 Temuan BPK di Ketapang

KETAPANG, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Gusti Kamboja, membeberkan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) per 31 Oktober 2010 terhadap Kabupaten Ketapang.

Kamboja mengungkapkan dari 2003 hingga 2009, terdapat 174 temuan BPK, dengan rekomendasi atau saran yang diberikan kepada Pemkab Ketapang, sebanyak 359 rekomendasi.

Hingga kini, menurut Kamboja, baru 34,5 persen atau 124 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Sebanyak 117 atau 32,5 persen rekomendasi ditindaklanjuti tidak sesuai saran,

dan sebanyak 123 atau 34 persen lebih belum ditindaklanjuti.

"Kami melihat tugas pemda untuk mendapat menyelesaikan rekomendasi ini, berat. Kabupaten Ketapang cukup lambat terkait tindak lanjut hasil temuan BPK, dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain," ujar Kamboja.

Di pemerintahan, Henrikus Kamboja menegaskan DPRD, siap mendorong bupati untuk menaikkan tindak lanjut hasil temuan BPK, minimal 50 persen di tahun ini. "Tindak lanjutnya



TRIBUN/PIO
Kamboja

paling tidak diharapkan 50 persen, kami percaya dan optimistis bupati bisa," katanya.

Temuan itu, tersebar di seluruh SKPD, dengan temuan terbesar terletak di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan. "Ini tersebar dalam semua SKPD, mulai dari keuangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Catatan Sipil, dan DPRD," ungkapnya.

Kamboja menuturkan, temuan dugaan kerugian negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan setiap SKPD, se-

banyak Rp 6,3 miliar pada. Pada 2007 sebanyak Rp 12,8 miliar, di 2008 sebanyak Rp 21,3 miliar, dan pada 2009 Rp 19,4 miliar.

"Kita mendorong bupati dapat menaikkan rekomendasi ke kita, sehingga kerugian daerah itu dapat kita tekan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Tidak hanya itu, dalam hal ini bupati diminta BPK untuk menetapkan pihak-pihak bertanggungjawab dalam penggunaan uang itu," ujarnya.

Bupati Ketapang, Henrikus, menegaskan ia akan berupaya menyelesaikan semua temuan BPK. (pio)